

Merobohkan Menara Gading Perguruan Tinggi

PERGURUAN tinggi (kampus) tempat mendalami teori sekaligus dapat menerapkan axiology pengetahuan, maka pandangan orang kampus (akademisi) sejatinya menjadi rujukan untuk merumuskan kebijakan pemerintah. Pandangan dan kajian akademisi terhadap permasalahan pembangunan senantiasa mengalir, ibarat sumber mata air tak pernah kering disegala musim, membasahi apa saja yang dilaluinya. Banyak aspek yang perlu diurai untuk menghilangkan sumbatan pembangunan, pemerintah tidak mungkin sendirian mengentasannya. Sayangnya kajian-kajian akademik tidak mengalir deras ia akan muncul bila diminta oleh pemerintah, maka kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah dirasakan selama ini kohesinya masih lemah. Keberadaan akademisi di tengah perumusan kebijakan serta perencanaan sifatnya personal, tidak terlembagakan. Kedekatan akademisi dengan pimpinan perangkat pemerintah (termasuk kepala daerah) lebih menonjol dibandingkan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan hasil rumusan kebijakan kerap tidak optimal, malahan mengecewakan.

Disaat yang sama tidak sedikit akademisi yang mumpuni dibidangnya tidak dilibatkan karena minim akses kepada lingkungan pemerintah. Akademisi semacam ini pada akhirnya lebih banyak menggumuli teori semata, lama kelamaan disematkan padanya sebagai orang yang terlalu banyak berteori, minim tindakan. Stereotipe pandangan semacam ini bisa dipahami, tapi ia tidak bisa dibenarkan juga sepenuhnya, karena mengembangkan teori juga merupakan cara bertindak untuk menghasilkan perubahan. Tidak ada perubahan besar yang dialami oleh umat manusia, termasuk kemajuan teknologi yang sudah memasuki fase keempat, atau istilah trendnya saat ini revolusi industri 4.0 semua diawali dari pengembangan teori. Merumuskan kebijakan, merencanakan pembangunan tanpa disokong dengan teori mutakhir, niscaya tidak akan sustainable bahkan minim efektifitasnya.

dilandasi pada kemutakhiran teori. Model perumusan kebijakan dan perencanaan semacam ini banyak dijumpai dalam keseharian, lebih berorientasi pada output (anggaran sudah terserap). Maka tidak mengherankan begitu banyak proyek-proyek mercusuar terbangun, setelah peremian tidak lagi berfungsi sebagaimana "khayalan semula", tidak sesuai peruntukannya. Maka apapun itu, perumusan kebijakan dan perencanaan diperlukan sentuhan akademik, maka disinilah dibutuhkan kehadiran perguruan tinggi.

Tantangannya, perguruan tinggipun wajib berbenah, begitu banyak pakar di dalamnya kenyang dengan teori perlu melibatkan dirinya secara langsung dalam agenda pemerintah maupun kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan pasar. Tanpa itu, akademisi akan merasa 'nikmat' sendiri, menghafal teori seolah telah melakukan banyak hal, sementara kondisi masyarakat diperhadapkan banyak masalah. Setidaknya dua persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, yakni kemiskinan dan ketimpangan. Kemiskinan melahirkan ketidakberdayaan, disaat yang sama ada segelintir elit dengan mudahnya menguasai sumber ekonomi dan politik, maka ketimpangan makin melebar. Ketidakberdayaan ekonomi dan politik serta ketimpangan yang melebar akan mudah memicu masalah sosial, seperti kriminalitas, radikalisme bahkan separatisme. Obatnya tidak akan disembuhkan dengan penindakan hukum, era dikalikasi maupun melumpuhkan dengan senjata.

Maka dalam konteks itu, untuk menurunkan angka kemiskinan serta mengurangi ketimpangan, perlub ada sinergi untuk semua elemen, perguruan tinggi (akademisi) terus "bicara", terlibat langsung, hadir merumuskan kebijakan sesuai kepakarannya. Dengan memfungsikan diri sebagai pembuat kebijakan



Oleh
Muh. Amier Arham*

hal-hal yang terjadi di sekitarnya.

UNG dan Pengembangan Kawasan

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) memerlukan reorientasi, tidak semata bersifat inward looking namun outward looking dibutuhkan. UNG

tidak ingin menjadi bagian dari yang hidup di atas menara gading, ia perlu memberikan nilai tambah tidak saja di daerah dimana bermukim, keluar dari area yang lebih luas (kawasan). Pengembangan kawasan membutuhkan konsepsi, petajalan untuk berkembang, seperti kawasan Teluk Tomini. Secara regional, UNG berada di Provinsi Gorontalo dimana daerah ini diperhadapkan pada masalah kemiskinan yang masih tinggi, serta ketimpangan yang begitu lebar. Program pengentasan kemiskinan cukup banyak yang telah ditelorkan, tetap saja belum mampu diturunkan secara signifikan. Kalaupun terjadi penurunan, cenderung makin lambat, padahal disaat yang sama anggaran kian makin banyak, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Makin melambatnya penurunan angka kemiskinan di tengah segudang program dan kucuran anggaran menyiratkan ada sesuatu yang salah, membutuhkan solusi secara komprehensif, metode dan caranya, termasuk perlunya meredesain program penguatan pemberdayaan masyarakat.

Urusan redesain program perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan solusi, maka disinilah pentingnya kapasitas dan kepakaran akademisi, dengan catatan kemitraan antara pemerintah dan perguruan tinggi antara satu dengan yang lain tidak saling mensubordinasi. Masukan orang kampus perlu menjadi perhatian, namun pandangan orang kampus (akademisi) dibutuhkan bersifat solutif, akademis dan bisa dioperasionalkan oleh pemerintah. Pemahaman teori yang baik, ditunjang pengalaman lapangan akan memudahkan para

(kombinasi teori dan pengalaman lapangan).

Kenyataan itu tak dapat dipungkiri, karena itu perlu terus didorong oleh pimpinan perguruan tinggi, termasuk UNG untuk meningkatkan kapasitas kepakaran (mutu SDM) disemua bidang keilmuan. Dengan modal itu, perguruan tinggi (UNG, red) bukan hanya terlibat dalam perumusan kebijakan di Gorontalo namun dapat memperluas jangkauannya lebih luas, khususnya di kawasan Teluk Tomini maupun daerah sekitarnya. Teluk Tomini dilingkari tiga provinsi, teluk ini memiliki potensi yang sangat besar dapat menghela pertumbuhan ekonomi kawasan. Potensi yang dimiliki oleh Teluk Tomini belum dioptimalkan keberadaannya, belum memberikan manfaat banyak bagi masyarakat di kawasan tersebut. Terhitung daerah yang paling miskin di Sulawesi Utara adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di Gorontalo angka kemiskinan tertinggi Kabupaten Boalemo dan di Sulawesi Tengah Kabupaten Tojo Una-Una, ketiganya merupakan kabupaten pesisir di kawasan Teluk Tomini.

Di tengah limpahan potensi sumber daya, sejatinya memberikan berkah peningkatan kesejahteraan, justru daerah-daerah termiskin di tiga provinsi berada disana. Tugas perguruan tinggi dibutuhkan kehadirannya memberikan alternatif solusi, khususnya peningkatan mutu SDM untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di Teluk Tomini. Kehadiran perguruan tinggi membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan tidak saja menjadi keharusan, tetapi ia sekaligus menghapus stigma berumah di atas menara gading. Selama ini disadari perguruan tinggi lebih disibukkan masalah internal, keterlibatan secara eksternal terhadap permasalahan riil masyarakat relatif jarang disalami. Kini saatnya menara gading yang kokoh itu dirobuhkan untuk berpijak ke bumi dimana masyarakat berada yang membutuhkan solusi membangun kawasan. Model semacam ini sudah berlangsung lama dilakoni perguruan tinggi besar, bagi UNG baru saja akan memulai secara kelembagaan untuk menjadi pusat informasi

PERGURUAN tinggi (kampus) tempat mendalami teori sekaligus dapat menerapkan axiology pengetahuan, maka pandangan orang kampus (akademisi) sejatinya menjadi rujukan untuk merumuskan kebijakan pemerintah. Pandangan dan kajian akademisi terhadap permasalahan pembangunan senantiasa mengalir, ibarat sumber mata air tak pernah kering disegala musim, membasahi apa saja yang dilaluinya. Banyak aspek yang perlu diurai untuk menghilangkan sumbatan pembangunan, pemerintah tidak mungkin sendirian mengentasannya. Sayangnya kajian-kajian akademik tidak mengalir deras ia akan muncul bila diminta oleh pemerintah, maka kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah dirasakan selama ini kohesinya masih lemah. Keberadaan akademisi di tengah perumusan kebijakan serta perencanaan sifatnya personal, tidak terlembagakan. Kedekatan akademisi dengan pimpinan perangkat pemerintah (termasuk kepala daerah) lebih menonjol dibandingkan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan hasil rumusan kebijakan kerap tidak optimal, malahan mengecewakan.

Disaat yang sama tidak sedikit akademisi yang mumpuni dibidangnya tidak dilibatkan karena minim akses kepada lingkungan pemerintah. Akademisi semacam ini pada akhirnya lebih banyak mengumuli teori semata, lama kelamaan disematkan padanya sebagai orang yang terlalu banyak berteori, minim tindakan. Stereotipe pandangan semacam ini bisa dipahami, tapi ia tidak bisa dibenarkan juga sepenuhnya, karena mengembangkan teori juga merupakan cara bertindak untuk menghasilkan perubahan. Tidak ada perubahan besar yang dialami oleh umat manusia, termasuk kemajuan teknologi yang sudah memasuki fase keempat, atau istilah trendnya saat ini revolusi industri 4.0 semua diawali dari pengembangan teori. Merumuskan kebijakan, merencanakan pembangunan tanpa disokong dengan teori mutakhir, niscaya tidak akan sustainable bahkan minim efekpositifnya.

Di tengah kehidupan serba pragmatism dan politik liberal, sudah menjadi kelaziman lahir pemimpin instan di semua level pemerintahan, efeknya tak jarang dalam merumuskan kebijakan serba instan pula yang didasarkan semata pada common sense, tidak

dilandasi pada kemutakhiran teori. Model-model perumusan kebijakan dan perencanaan semacam ini banyak dijumpai dalam keseharian, lebih berorientasi pada output (anggaran sudah terserap).

Maka tidak mengherankan begitu banyak proyek-proyek mercusuar terbangun, setelah peresmian tidak lagi berfungsi sebagaimana "khayalan semula", tidak sesuai peruntukannya. Maka apapun itu, perumusan kebijakan dan perencanaan diperlukan sentuhan akademik, maka disinilah dibutuhkan kehadiran perguruan tinggi.

Tantangannya, perguruan tinggipun wajib berbenah, begitu banyak pakar di dalamnya kenyang dengan teori perlu melibatkan dirinya secara langsung dalam agenda pemerintah maupun kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan pasar. Tanpa itu, akademisi akan merasa 'nikmat' sendiri, menghafal teori seolah telah melakukan banyak hal, sementara kondisi masyarakat diperhadapkan banyak masalah. Setidaknya dua persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, yakni kemiskinan dan ketimpangan. Kemiskinan melahirkan ketidakberdayaan, disaat yang sama ada segelintir elit dengan mudahnya menguasai sumber ekonomi dan politik, maka ketimpangan makin melebar. Ketidakberdayaan ekonomi dan politik serta ketimpangan yang melebar akan mudah memicu masalah sosial, seperti kriminalitas, radikalisme bahkan separatisme. Obatnya tidak akan disembuhkan dengan penindakan hukum, dera dikalisasi maupun melumpuhkan dengan senjata.

Maka dalam konteks itu, untuk menurunkan angka kemiskinan serta mengurangi ketimpangan, perlu ada sinergi untuk semua elemen, perguruan tinggi (akademisi) terus "bicara", terlibat langsung, hadir merumuskan kebijakan sesuai kepakarannya. Dengan memfungsikan dirinya terhadap agenda pembangunan, stigma hidup di atas menara gading pasti akan terkikis secara perlahan. Menara gading itu maksudnya tempat untuk menyendiri, misal tempat studi, yang memberi kesempatan untuk bersikap masa bodoh terhadap



Oleh
Muh. Amier Arham*

hal-hal yang terjadi di sekitarnya.

UNG dan Pengembangan Kawasan

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) memerlukan reorientasi, tidak semata bersifat inward looking namun outward looking dibutuhkan. UNG

tidak ingin menjadi bagian dari yang hidup di atas menara gading, ia perlu memberikan nilai tambah tidak saja di daerah dimana bermukim, keluar dari area yang lebih luas (kawasan). Pengembangan kawasan membutuhkan konsepsi, petajalan untuk berkembang, seperti kawasan Teluk Tomini. Secara regional, UNG berada di Provinsi Gorontalo dimana daerah ini diperhadapkan pada masalah kemiskinan yang masih tinggi, serta ketimpangan yang begitu lebar. Program pengentasan kemiskinan cukup banyak yang telah ditelorkan, tetap saja belum mampu diturunkan secara signifikan. Kalaupun terjadi penurunan, cenderung makin melambat, padahal disaat yang sama anggaran kian makin banyak, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Makin melambatnya penurunan angka kemiskinan di tengah segudang program dan kurangan anggaran menyiratkan ada sesuatu yang salah, membutuhkan solusi secara komprehensif, metode dan caranya, termasuk perlunya meredesain program penguatan pemberdayaan masyarakat.

Urusan redesain program perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan solusi, maka disinilah pentingnya kapasitas dan kepakaran akademisi, dengan catatan komitmen antara pemerintah dan perguruan tinggi antara satu dengan yang lain tidak saling men subordinasi. Masukan orang kampus perlu menjadi perhatian, namun pandangan orang kampus (akademisi) dibutuhkan bersifat solutif, akademis dan bisa dioperasionalkan oleh pemerintah. Pemahaman teori yang baik, ditunjang pengalaman lapangan akan memudahkan para akademisi merumuskan kebijakan, bahkan riset yang dikembangkan akan lebih membumi yang dapat dijabarkan oleh pemerintah dalam bentuk aksi. Sekali pun nyatanya tidak banyak akademisi memiliki kemampuan dua sekaligus

(kombinasi teori dan pengalaman lapangan).

Kenyataan itu tak dapat dipungkiri, karena itu perlu terus didorong oleh pimpinan perguruan tinggi, termasuk UNG untuk meningkatkan kapasitas kepakaran (mutu SDM) disemua bidang keilmuan. Dengan modal itu, perguruan tinggi (UNG, red) bukan hanya terlibat dalam perumusan kebijakan di Gorontalo namun dapat memperluas jangkauannya lebih luas, khususnya di kawasan Teluk Tomini maupun daerah sekitarnya. Teluk Tomini dilingkari tiga provinsi, teluk ini memiliki potensi yang sangat besar dapat menghela pertumbuhan ekonomi kawasan. Potensi yang dimiliki oleh Teluk Tomini belum dioptimalkan keberadaannya, belum memberikan manfaat banyak bagi masyarakat di kawasan tersebut. Terhitung daerah yang paling miskin di Sulawesi Utara adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di Gorontalo angka kemiskinan tertinggi Kabupaten Boalemo dan di Sulawesi Tengah Kabupaten Tojo Una-Una, ketiganya merupakan kabupaten pesisir di kawasan Teluk Tomini.

Di tengah limpahan potensi sumber daya, sejatinya memberikan berkah peningkatan kesejahteraan, justru daerah-daerah termiskin di tiga provinsi berada disana. Tugas perguruan tinggi dibutuhkan kehadirannya memberikan alternatif solusi, khususnya peningkatan mutu SDM untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di Teluk Tomini. Kehadiran perguruan tinggi membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan tidak saja menjadi keharusan, tetapi ia sekaligus menghapus stigma berumah di atas menara gading. Selama ini disadari perguruan tinggi lebih disibukkan masalah internal, keterlibatan secara eksternal terhadap permasalahan riil masyarakat relatif jarang diselami. Kini saatnya menara gading yang kokoh itu dirobohkan untuk berpijak ke bumi dimana masyarakat berada yang membutuhkan solusi membangun kawasan. Model semacam ini sudah berlangsung lama dilakoni perguruan tinggi besar, bagi UNG baru saja akan memulai secara kelembagaan untuk menjadi pusat informasi Kawasan Teluk Tomini yang nantinya akan menjadi center of development di Kawasan Timur Indonesia bagian utara. (*)

Penulis adalah Dekan
Fakultas Ekonomi UNG